

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2012a).

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sehingga terdapat perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya dilihat dari kenaikan pendapatan nasional tanpa diikuti dengan perubahan sistem kelembagaan, sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional yang diikuti dengan perubahan sistem kelembagaan dan adanya pemerataan (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan riil biasanya dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang dengan tujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi di negara sedang berkembang seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus menerus maka dimungkinkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi dan sebagainya. Sedangkan faktor nonekonomi diantaranya adalah adanya peran lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, serta kondisi politik dan kelembagaan. Prof. Bauer menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan (Jhingan, 2012). Berikut adalah faktor ekonomi dan nonekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

1) Faktor Ekonomi

a) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian. Sumber daya alam atau tanah dalam ilmu ekonomi mencakup

kesuburan tanah, letak dan susuanannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber daya alam yang melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam maka tidak akan dapat melakukan pembangunan dengan cepat. Sebagaimana dinyatakan oleh Lewis bahwa dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan mereka tidak memilikinya.

b) Akumulasi Modal

Faktor ekonomi lain yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (Jhingan, 2012). Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Akumulasi modal merupakan investasi dalam bentuk barangbarang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional.

Akumulasi modal merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak akumulasi modal mencerminkan permintaan efektif, dan disisi yang lain akumulasi modal dapat menciptakan efisiensi bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang

meningkat. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal ini juga mengarah pada kemajuan teknologi, selanjutnya kemajuan teknologi akan mengarah pada spesialisasi dan penghematan produksi dalam skala luas.

c) Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi. Perubahan pada teknologi mampu menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik (Jhingan, 2012).

2) Faktor Non-ekonomi

a) Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menghasilkan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Penduduk yang terdidik dan modern bersikap sangat mendukung terlaksananya

pembangunan karena memiliki sifat yang terbuka terhadap perubahan dan bersikap positif dalam pembangunan. Sebaliknya, masyarakat tradisional dan tidak terdidik bersikap apatis atau masa bodoh terhadap pembangunan. Masyarakat tradisional tersebut cenderung tidak menyukai perubahan-perubahan dan sulit untuk memanfaatkan teknologi sehingga akan menghambat pembangunan.

b) Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012). Pertumbuhan yang terjadi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusianya saja tetapi menekankan pada efisiensi. Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barangbarang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif.

Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang (mandays) maupun jam kerja orang (manhours). Dapat saja terjadi jumlah

orang yang bekerja tetap tetapi jumlah hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu diketahui bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Teori ekonomi telah menemukan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan, dan keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat kecakapan, keterampilan, dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun non-formal seperti latihan-latihan kerja.

c) Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012). Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar dalam proses pertumbuhan ekonomi. Professor Lewis mengungkapkan bahwa tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi. Pemerintahan yang baik dengan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat akan menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi, pemerintah harus

memberikan jasa-jasa yang diperlukan untuk merangsang perkembangan ekonomi seperti ketertiban, kestabilan sistem pemerintahan dan sebagainya. Dengan adanya ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum akan mendorong adanya wirausaha baru yang akan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi.

3) Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan Adam Smith, pengembangan hak milik, spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis (Arsyad, 2010). Smith, membagi sejarah peradaban manusia dalam empat tahapan yaitu tahap berburu, tahap beternak, tahap pertanian, dan tahap perdagangan. Smith juga menambahkan bahwa seiring dengan laju pertumbuhan perekonomiannya, masyarakat akan bergerak dari tahap masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern.

Dalam pemikirannya, Smith mengkritik pandangan kaum merkantilisme. Menurut Smith, kepemilikan atas emas dan perak oleh suatu negara bukanlah suatu ukuran kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada hasil kerja suatu negara. Kekayaan nasional dapat dibentuk oleh dua hal yaitu, ketrampilan dan penggunaan tenaga kerja secara efisien

serta pertimbangan yang tepat antara tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja nonproduktif.

Pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010). Dalam aspek pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu :

- (1) Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumberdaya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan. Maksudnya, jika sumberdaya alam belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam telah digunakan secara optimal.
- (2) Sumberdaya manusia direpresentasikan oleh jumlah penduduk. Sumberdaya manusia memegang peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- (3) Akumulasi modal yang dimiliki, dimana stok modal memegang peranan paling penting dalam pembangunan

ekonomi. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Aspek lain dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat dan mendorong perkembangan teknologi. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

b) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Model pertumbuhan neoklasik menjelaskan tentang output homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja. Unsur-unsur baru dari model pertumbuhan neoklasik adalah modal dan perubahan teknologi (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Dalam hal ini teknologi dianggap tetap dan modal adalah barang-barang yang diproduksi dengan daya tahan lama untuk digunakan membuat barang-barang baru.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan (Arsyad, 2016). Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Model neoklasik Solow Swan secara umum berbentuk fungsi produksi, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Menurut teori ini rasio modal-output dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbedabeda. Jika lebih banyak modal yang digunakan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

Model Solow-Swan selalu mengasumsikan hubungan antara modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Namun model ini bisa dimodifikasi untuk memasukkan kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen.

Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2006).

c) Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris bernama John Maynard Keynes. Teori ekonominya didasarkan pada hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain (Mankiw, 2006). Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Keynes menawarkan solusi atas hambatan perekonomian ini yaitu dengan campur tangan dari sektor publik dan

pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan supply uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Keynes juga mengembangkan model makro ekonomi yaitu $Y = C + I + G + X - M$. Model ini menjelaskan terjadinya kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap PDB. PDB yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Begitu sebaliknya, terjadinya penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta net ekspor akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap PDB. PDB yang menurun akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

d) Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri (Arsyad, 2010).

Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu pengertian modal disini bersifat lebih luas, bukan hanya sekadar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (*human capital*).

Teori pertumbuhan endogen dengan jelas menggambarkan tentang bagaimana akumulasi modal tidak mengalami *diminishing returns*, namun justru akan mengalami *increasing return* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan. Teori ini memiliki tiga elemen dasar yaitu :

- (1) Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi ilmu pengetahuan.
- (2) Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme lubran pengetahuan (*knowledge spillover*).
- (3) Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

2. Produk Domestik Regional Bruto

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Tarigan (2005) dalam konteks ekonomi regional, indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

b. Metode Perhitungan PDRB

Menurut Tarigan (2005), metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode langsung dapat mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Metode tidak langsung adalah perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas areal, sebagai alokatornya.

1) Metode Langsung

a) Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang diproduksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya.

b) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sector pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sector yang berupa jasa tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sector pemerintahan.

c) Pendekatan Pengeluaran

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk : konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi) perubahan stok, dan ekspor netto.

2) Metode Tidak Langsung

Alokator yang digunakan:

- a) Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan.
- b) Jumlah penduduk fisik.
- c) Tenaga kerja.
- d) Penduduk.
- e) Alokator tidak langsung lainnya.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2016).

Penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2012)

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2010) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier dalam Kuncoro (2010), di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa

pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu :

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- b. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- c. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di negara yang sedang berkembang membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

4. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah yang lain menurut Kaho (1998) dalam Munir dkk. (2004) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Menurut Munir dkk. (2004), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian, Pajak Parkir.

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi
 - b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat
 - e) Potensinya memadai
 - f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
 - g) Menjaga kelestarian lingkungan
 - h) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut Munir dkk. (2004), hasil retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau bersama.

Adapun jenis retribusi daerah menurut UU No. 33 tahun 2000 Pasal 18, yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan tertentu. Jenis-jenis retribusi yang dimaksud sesuai dengan kriteria tersebut sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pribadi atau bersama yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar glosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

retribusi penyebrangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c) Retribusi Perijinan Tertentu

(1) Perijinan tersebut kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

(2) Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

(3) Biaya yang menjadi beban daerah yang dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Dalam hal ini, antara lain adalah bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah diharapkan sebagai pemasukan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan daerah harus bersifat profesional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi.

Perusahaan daerah atau BUMD adalah semua perusahaan yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1962. Sedangkan menurut penjelasan UU No. 5 tahun 1974, perusahaan daerah dirumuskan sebagai bagian usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan daerah dan menambah penghasilan daerah (Lubis, 2005).

4) Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah

Dalam hal ini, antara lain adalah hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

5. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Salah satu pengeluaran pemerintah adalah Belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal termasuk : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (Halim, 2007).

Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta

tetap lainnya. Dengan peningkatan belanja modal, diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu juga meningkatnya belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Todaro, 2006).

b. Peranan Belanja Modal Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perekonomian negara terbelakang, kebijakan fiskal berperan untuk memacu laju pembentukan modal (Jhingan, 2012). Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah. Menurut teori Rostow dan Musgrave, pengeluaran pemerintah berkembang di tiga tahapan pembangunan ekonomi:

- 1) Tahap awal pembangunan, pemerintah sebagai penyedia infrastruktur
- 2) Tahap menengah pembangunan pemerintah sebagai investor yang diperlukan untuk prasarat tinggal landas
- 3) Tahap pembangunan ekonomi lebih lanjut, pemerintah mulai beralih pada pengadaan program kesehatan dan pelayanan masyarakat

Pengeluaran pemerintah yang terencana melalui APBD, diarahkan untuk pengeluaran sosial dan ekonomi. Penyusunan APBD selalu

diharapkan dapat mencapai tujuan antara lain fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan (Suparmoko, 2000).

APBD merupakan daftar pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu (Suparmoko, 2000). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerimaan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat ataupun pemda lain dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja modal merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membagi belanja modal menjadi lima bagian yaitu:

- 1) Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, perawatan, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Kelima bagian diatas terangkum dalam belanja modal yang berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja jalan, jaringan, peralatan dan mesin dapat mendorong kelancaran proses usaha sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pemerintah juga menyediakan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, perumahan murah dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan investasi modal manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Menurut Prasetyo (2008), pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama dalam suatu periode tertentu. Beberapa unsur dalam pengertian inflasi yaitu:

- 1) Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus-menerus.
- 2) Kenaikan harga ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama, yang terpenting ada kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode tertentu.
- 3) Jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara dan tidak berdampak luas berarti itu bukan merupakan inflasi.

b. Teori – Teori Inflasi

Menurut Basuki dan Prawoto (2014) teori kuantitas membedakan sumber terjadinya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang bertambah terlalu kuat akibat tingkat harga umum naik (misalnya karena bertambahnya pengeluaran perusahaan).

2) Inflasi Dorongan Penawaran (*Cost Push Inflation*)

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang serta turunnya produksi (misalnya kenaikan harga barang baku yang didatangkan dari luar negeri, kenaikan harga BBM).

c. Penggolongan Inflasi

Penggolongan inflasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Inflasi Menyerap (*Creeping Inflation*)

Berdasarkan inflasi ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun) > kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang sama.

2) Inflasi Menengah atau Ganas (*Galloping Inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi (antara 10% - 50% per tahun). Sebagai konsekuensinya,

masyarakat hanya memegang sejumlah uang yang minimum hanya diperlukan untuk transaksi harian saja.

3) Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Inflasi ini merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik 5 atau 6 kali bahkan lebih, masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk menyimpan uang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja dan ditandai dengan laju inflasi diatas 50% per tahun.

d. Dampak Inflasi

Efek yang timbul dari inflasi diantaranya adalah:

1) Efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*)

Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Masyarakat yang dirugikan karena pendapatan yang riil masyarakat menurun, kemudian masyarakat yang diuntungkan adalah orang yang memanfaatkan situasi tingkat inflasi yang tinggi dengan spekulasi yang merugikan masyarakat banyak, dan hal tersebut sangat dilarang dalam ekonomi syariah.

2) Efek Efisiensi

Pengaruh inflasi dapat terjadi pada perubahan pola alokasi faktor produksi dalam proses produksi. Permintaan akan suatu barang tertentu mengalami kenaikan lebih besar dari barang-barang lain yang juga dapat berakibat pada kenaikan yang lebih besar dari

barang-barang yang juga dapat mengubah alokasi faktor produksi yang ada.

3) Efek Terhadap Output

Pada efek ini masih dipertanyakan tentang bagaimana pengaruh inflasi terhadap output. Biasanya kenaikan inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga output turun atau produksi turun. Namun dalam jangka pendek biasanya inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Dalam jangka panjang dipastikan inflasi akan menurunkan daya beli dan menurunkan output.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut memberikan banyak masukan sehingga hal tersebut dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya pada penelitian yang selanjutnya.

Alexiou (2009) melakukan penelitian yang membahas tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Negara Eropa Tenggara. Metode yang digunakan yaitu data panel di 7 negara Uni Eropa (Bulgaria, Serbia, Fyrom, Croatia, Bosnia, Albania dan Romania) dalam kurun waktu 1995-2005. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

belanja modal, bantuan pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan pembangunan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Belanja modal pemerintah berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja modal pemerintah juga berperan untuk memacu laju pertumbuhan akumulasi modal.

Selanjutnya Kweka dan Morrissey (2000) membahas mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Tanzania tahun 1965-1996. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data time series di Tanzania. Alat analisis yang digunakan adalah regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dalam jangka panjang dan pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah dalam jangka panjang dan pendek berpengaruh positif dan signifikan, pengeluaran modal insani berpengaruh signifikan, sedangkan investasi berdampak positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang digunakan secara produktif dapat dinilai baik dan secara positif akan meningkatkan investasi di negara Tanzania. Sehingga hal tersebut akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Tanzania.

Setelah itu Kusuma (2017) membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Malaysia dengan menggunakan metode ECM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak jangka panjang diantara harga minyak, investasi asing langsung (FDI), ekspor dan inflasi. Harga minyak, investasi asing langsung (FDI), dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia tahun 1976-2016. Namun, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Berdasarkan kondisi ini, banyak inisiatif yang dapat dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung dan mendorong kegiatan ekspor dikalangan pengusaha lokal dengan tujuan meningkatkan produksi dalam negeri yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lainnya adalah Aziz dan Azmi (2017) membahas tentang faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) di Malaysia. Data yang digunakan yaitu seri tahunan periode 1982 sampai 2013 dengan menggunakan metode Least Square Method (OLS) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI dan tenaga kerja perempuan berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB. Namun, FDI adalah satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Malaysia. Selain itu, Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB Malaysia. Selanjutnya, ditemukan bahwa PDB, Inflasi, FDI dan Tenaga Kerja Perempuan tidak bergerak dalam tingkatan. Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan dalam menjaga dan mengontrol stabilitas inflasi dapat dilakukan

dengan meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi.

Selain itu Ardiansyah (2012) membahas pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang dapat mengontrol stabilitas inflasi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyebab meningkatnya inflasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh meningkatnya harga barang dan jasa di masyarakat sehingga akan membuat harga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian daya beli masyarakat akan menurun dan membuat produsen akan mengalami kerugian. Hal tersebut akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dalam mengontrol stabilitas inflasi dapat dilakukan untuk mengatasi kenaikan tingkat inflasi di Indonesia.

Kemudian Butar (2017) menganalisis tentang pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan yaitu data panel pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Hubungan negatif ini dapat disebabkan oleh pengelolaan belanja yang belum baik seperti kebijakan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, selain itu juga dapat disebabkan karena belanja yang dikeluarkan tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Untuk itu, pengelolaan belanja modal yang baik akan membantu pembangunan sarana prasarana guna melancarkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini, upaya dalam mengoptimalkan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni dengan menerapkan dan mensosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai infrastruktur daerah. Semakin meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang membahas pertumbuhan ekonomi daerah adalah Priambodo (2015) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012. Metode yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penggalan sumber ekonomi asli daerah yang digunakan

untuk menyelenggarakan aktivitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja juga merupakan faktor produksi yang menggerakkan perekonomian, pelatihan keterampilan khusus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Alokasi anggaran untuk belanja modal diarahkan kepada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah produksi atau penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Wasingah (2018) menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Variabel yang digunakan yaitu PDRB atas dasar harga konstan, IPM, kemiskinan, inflasi, dan jumlah penduduk yang bersumber dari BPS Jawa Tengah dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya peningkatan IPM di provinsi Jawa Tengah maka akan berdampak pada perbaikan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, lalu kemiskinan mengindikasikan

banyaknya penduduk yang tidak mengenyam pendidikan dengan layak. Kebijakan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan mensosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kemudian inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan ketika terjadi inflasi dan tidak diimbangi dengan naiknya daya beli masyarakat maka tidak mempengaruhi produsen untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan tingkat produksi yang dihasilkan akan meningkat, sehingga membuat kenaikan pendapatan nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Hapsari dan Iskandar (2018) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect*. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan investasi swasta berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memiliki hubungan positif yang menandakan bahwa pengeluaran belanja modal sudah dimanfaatkan secara efisien dan terserap dengan baik. Manfaat ini dapat dilihat dari kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik serta infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan produksi dalam perekonomian. Lalu, jumlah penduduk

juga berpengaruh positif yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam segi produksi maupun konsumsi. Kemudian tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, implikasinya adalah seorang yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi akan memiliki kemampuan, kreativitas, disiplin, dan pengetahuan yang dapat menunjang pekerjaannya dikemudian hari. Selain itu, investasi swasta yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan disebabkan nilai investasi yang belum terencana. Terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang proyek investasinya belum terealisasi. Kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan meningkatnya fasilitas kesehatan berupa unit rumah sakit dan puskesmas dapat menurunkan anggaran pemerintah. Namun, hal tersebut juga bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

Penelitian lain yang membahas pertumbuhan ekonomi adalah Hapsa dan Khoirudin (2018) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008-2016 dengan menggunakan metode cluster sampling. Variabel yang digunakan yaitu PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan yang

dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan memacu kualitas tenaga kerja akan mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga jumlah penduduk D.I Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB D.I Yogyakarta tahun 2008-2017.
2. Diduga belanja modal D.I Yogyakarta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB D.I Yogyakarta tahun 2008-2017.
3. Diduga pendapatan asli daerah D.I Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB D.I Yogyakarta tahun 2008-2017.
4. Diduga inflasi D.I Yogyakarta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB D.I Yogyakarta tahun 2008-2017.

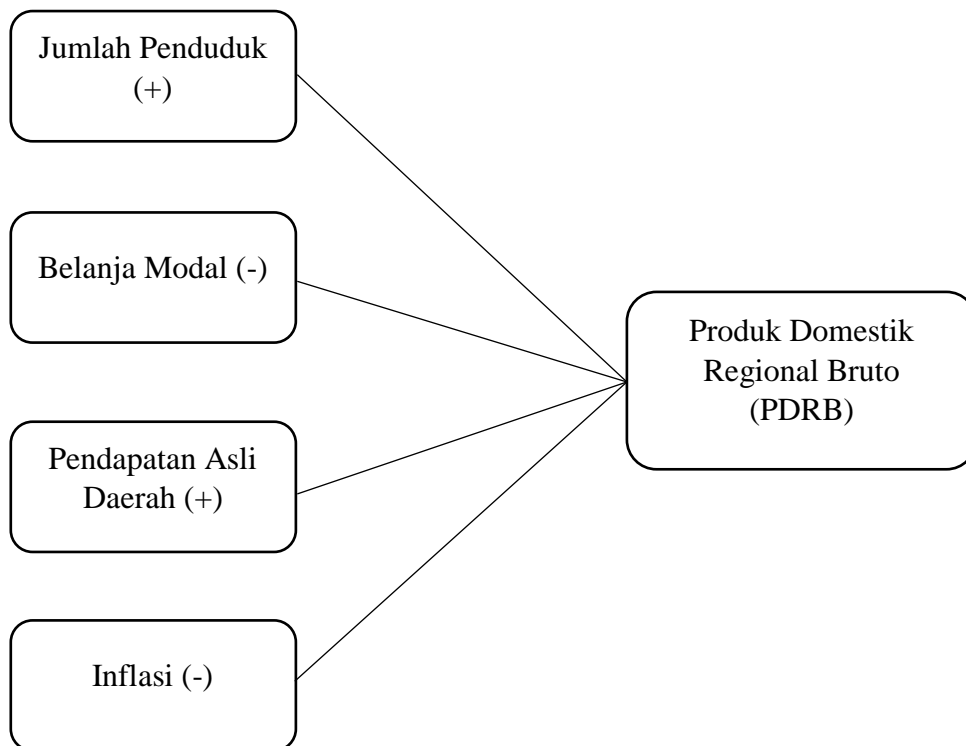
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tiap variabel dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1

No	Variabel	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Sign
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Atas Dasar Harga Berlaku (Trilliun Rupiah)	(Ardiansyah, 2012) (Alexiou, 2009)(Kusuma, 2017)	
2	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (Ribu Jiwa)	(Hapsari dan Iskandar, 2018) (Wasingah, 2018)	(+)
3	Belanja Modal	Pengeluaran Modal (Milyar Rupiah)	(Alexiou, 2009) (Butar, 2017) (Priambodo, 2015)	(-)
4	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah (Milyar R upiah)	(Priambodo, 2015) (Butar, 2017) (Hapsari dan Iskandar, 2018) (Hapsa dan Khoirudin, 2018)	(+)
5	Inflasi	Harga Konsumen (%)	(Ardiansyah, 2012) (Raja Aziz & Azmi, 2017)	(-)

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir penting untuk dijelaskan secara teoritis mengenai variable dependen dan variable independen. Dengan demikian maka model penelitian penulis dari penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebagai variable dependen dipengaruhi oleh jumlah penduduk, belanja modal, pendapatan asli daerah dan inflasi yaitu sebagai variable independen.



Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran